

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN  
KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (SI)  
Ilmu Hukum dengan kekhususan

HTN / HAN



Disusun oleh :

SUKATUN

NIM. 2009 - 20 - 011

Disetujui  
Pembimbing I

Pembimbing II

**KRISTIYANTO, SH.MH**

**SUMONO, SH**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum UMK

**RISTAMADJI, SH, MH**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- ❖ Janganlah mudah putus asa, tetap selalu optimis dalam menggapai cita dan cinta
- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”  
(Q.S Alam Nasyrh: 6-8)

### PERSEMBAHAN:

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta
2. Suami yang kusayangi
3. Anak-anakku tercinta
4. Sahabat-sahabatku
5. Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI**” dengan lancar.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Progam strata satu ( SI) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Ristamadji, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Kristiyanto, SH.MH, selaku dosen pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Bapak, Sumono, SH, selaku pembimbing II, sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kabupaten Pati
5. Kepada Pimpinan PT. NASMOCO Semarang.

6. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.



## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI ” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat DPRD Kabuapten Pati, untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat DPRD Kabuapten Pati.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Metode pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Jenis penelitian ini mempergunakan sumber data primer sebagai data utamanya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga mempergunakan data sekunder sebagai data pendukung. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat DPRD Kabuapten Pati.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa penunjukkan langsung/ pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya. pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan. PA/KPA dilarang menggunakan metode penunjukkan langsung/ pengadaan langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

Dalam pelaksanaan pengadaan Kendaraan bermotor di Skretariat DPRD Kabupaten Pati ada kendala Dalam pelaksanaan pengadaan Kendaraan bermotor di Skretariat DPRD Kabupaten Pati ada sedikit kendala. Kendala tersebut hanya bersifat ringan karena kendala yang terjadi pada interen panitia pengadaan barang dan jasa di skretariat DPRD Pati, yaitu dalam kepanitiaan di lingkungan DPRD Pati belum ada SKPD yang mempunyai sertifikat Pejabat Pembuat Komitmen. Akan tetapi dalam pengadaan barang/ jasa di lingkungan DPRD Pati panitia melibatkan SKPD dari Instansi lainnya yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi pejabat pembuat komitmen, dalam Metode penilaian terhadap kualifikasi ini terdiri atas 2 metode, yaitu Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Kata Kunci : Penunjukkan langsung, pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Pemerintah Daerah .....	11
B. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa .....	14
C. Penentuan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.....	16
D. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	20
E. Pembentukan Panitia Pengadaan/ Penunjukan Pejabat Pengadaan.....	26
F. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah.....	27

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
	A. Metode Pendekatan .....	33
	B. Spesifikasi Penelitian .....	34
	C. Metode Penentuan Sampel .....	34
	D. Metode Pengumpulan Data .....	35
	E. Metode Penyajian Data .....	36
	F. Metode Analisis Data .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>38</b>
	A. Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di Sekretariat DPRD Kabupaten Pati .....	38
	B. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Di Sekretariat DPRD Kabupaten Pati .....	52
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
	A. Kesimpulan .....	55
	B. Saran-saran .....	56

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**